

Konsep Kebijakan Pentingnya Penyusunan Rencana Aksi Damai yang Berperspektif Adil Gender di Poso

Januari 2020

Tim Rencana Aksi Damai (RAD) Perempuan untuk Perdamaian Poso

Bekerja sama dengan

Pusat Kajian Hukum, Perempuan dan Masyarakat (Law, Gender and Society),
Fakultas Hukum UGM



Unit Riset dan Publikasi
Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

Research Center for
LAW, GENDER, & SOCIETY
Faculty of Law UGM

RAD
PEREMPUAN POSO

TIM RENCANA AKSI DAERAH PEREMPUAN UNTUK PERDAMAIAN DI POSO.

Editor:

Sri Wiyanti Eddyono (Law, Gender, and Society, Fakultas Hukum UGM)

Desain dan Layout:

Jessica Calista Angelina
Abimanyu Farras

Tim Penulis dan contributor:

1. Salma Masri (KPKPST)
 2. Evani Hamzah (Solidaritas Perempuan – Sintuwuraya Poso)
 3. Roswin Wuri (Sekolah Perempuan Aman -Poso)
 4. Budiman Maliki (LPMS)
 5. Indrianti Nur (LPMS)
 6. Nurlaila Lamasituju (Buyung Katedo, Poso)
 7. Martince (Mosintuwu, Tentena Poso)
 8. Jalaludin (Kesbangpol Pemda Poso)
 9. Fuad Amhar (Dinas Sosial, Pemda Poso)
 10. Mariones Biralino (Anggota DPRD, Poso)
 11. Lies Sigilipu (Universitas Kristen Tentena Poso)
 12. Sri Wiyanti Eddyono (FH UGM, Yogyakarta)
 13. Aisyah (Dinas Pemberdayaan Perempuan)
 14. Ningsi (Dinas Pendidikan)
 15. Thabita (Akademisi)
 16. Betsi Kabilaha (WIA)
 17. Ruwaida (STAI POSO)
 18. Fero (Dinas Sosial)
-

“Ketika konflik, saya sangat takut dan merasa sangat khawatir. Kekhawatiran yang paling utama adalah situasi keluarga saya; apakah bapak saya, dan saudara laki-laki saya terlibat dalam konflik? Di mana mereka? Rumah kami terancam dan kami semua bersembunyi sambil mencari keluarga yang lain; memastikan kami semua aman.”

“Konflik yang melanda Poso saat itu memberikan luka dan duka yang dalam, rasa kebersamaan dan persaudaraan menjadi hilang, masyarakat kehilangan rasa damai, masyarakat terkotak-kotak sesuai komunitas agamanya, ada rasa saling curiga ada rasa takut...”

“Sedih, takut, kecewa, marah...konflik yang terjadi adalah tragedi kemanusiaan yang meluluhlantakkan semua aspek kehidupan orang Poso; munculnya dan menguatnya kebencian antar agama dan etnis di mana-mana. Saat itu situasi mencekam karena teror dan ancaman di mana-mana..”

“Ketika kami ingin bertemu di Malino, pak Jusuf kalla bertanya, sebenarnya kamu orang Poso apa yang kamu mau, kami bilang kami ingin aman, kami tidak ingin sembako dan lainnya, banyak sekali yang menjawab kami hanya ingin aman dan bisa ke kebun, ini membuka mata orang bahwa kita tidak hanya ingin dibantu dengan sembako, tapi kami hanya ingin rasa aman...”

(Disampaikan oleh para peserta lokakarya Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Damai Perempuan Poso, 29-30 Januari 2019)

Kata Pengantar

Konsep Kebijakan ini disusun sebagai naskah akademis atau dasar argumentasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Perdamaian yang berperspektif Gender di Poso. Inisiatif penyusunan RAD muncul dari proses yang panjang. Inisiasi ini dimulai dari adanya penelitian tentang Peran Perempuan dalam Mencegah Kekerasan berbasis Ekstrimisme di beberapa daerah termasuk di Poso yang dilakukan oleh Gender, Peace and Security Centre, Monash University, Australia (Monash GPS) dengan Semarak Cerlang Nusa, Consultancy, Research, Education and Social Transformation (SCN CREST) Indonesia pada tahun 2016 yang dikordinasi oleh Sri Wiyanti Eddyono dan Jaque True. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa inisiatif-inisiatif perempuan di Poso dalam mencegah konflik yang berkelanjutan di Poso sangat beragam, dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara individu maupun kolektif. Sayangnya inisiatif yang ada belum terkoneksi dan bersinergi sehingga belum dianggap memberi dampak signifikan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah. Dampaknya, pelibatan perempuan dalam perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan perdamaian di Poso belum dianggap penting dan inisiatif-inisiatif yang ada kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Hasil penelitian Peran Perempuan dalam Mencegah Kekerasan berbasis Ekstrimisme disampaikan kepada para partisipan penelitian di Poso dalam bentuk seminar hasil penelitian pada 9 Desember 2017. Seminar ini diorganisir oleh KPKPST Palu dan SCN CREST Jakarta. Dalam seminar, para partisipan menyampaikan pandangannya bahwa hasil dari penelitian itu sesuai dengan apa yang terjadi. Para partisipan memberikan apresiasi kepada tim Peneliti karena memberikan hasil penelitian kembali ke partisipan penelitian sehingga

partisipan penelitian dapat mengambil pelajaran dari hasil penelitian tersebut. Pada sesi akhir dari seminar tersebut dibahas pula tentang bagaimana menggunakan hasil penelitian untuk pembangunan Poso di masa mendatang. Pada sesi tersebut, peserta bersepakat untuk membentuk tim guna mensinergikan dan mengkonsolidasikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di tingkat Poso. Tim yang dibentuk juga berkeinginan membangun perencanaan lebih sistematis untuk memasukkan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Poso.

Tim tersebut sejalan dengan waktu menjadi Tim Rencana Aksi Daerah Perempuan untuk Perdamaian di Poso. Tim ini beranggotakan berbagai organisasi masyarakat, akademisi dan pemerintah. Tim melakukan pertemuan sebagai berikut:

- 1) 7 Juli 2009, Poso, workshop pertemuan awal, TIM RAD dengan agenda mengelaborasi perkembangan POSO paska Desember 2017 dan menyusun rencana ke depan.
 - 2) 27-28 Juli 2018, Poso, workshop penyusunan RAD dengan agenda mendiskusikan prinsip-prinsip dalam penyusunan RAD, program-program yang hendak dimasukkan di dalam RAD, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian RAD.
 - 3) Lokakarya Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Damai Perempuan Poso, 29-30 Januari 2019. Konsultasi ini dihadiri dari stakeholder pemerintah dan organisasi masyarakat. Konsultasi ini dibuka oleh Bupati Poso sebagai wujud dari dukungan terhadap inisiatif yang ada. Dalam Konsultasi juga dibahas tentang;
1) kerangka partisipasi perempuan dalam perdamaian di tingkat nasional yang disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Azriana Rambe); 2) Refleksi Peran Perempuan dalam memelihara
-

perdamaian di Aceh dan Ambon oleh Peneliti dari Gender Dimension Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan UGM (Arifah). Dalam konsultasi ini dibahas masukan-masukan terhadap poin-poin pemikiran draft RAD dan program-program yang dianggap penting diintegrasikan ke dalam RAD.

4) Finalisasi draft Konsep Note RAD Poso paskah Lokakarya Konsultasi oleh Tim RAD di Poso, 17 Mei 2019; termasuk lanjutan kajian literature.

5) Konsinyering review Konsep Note RAD Poso hasil dari tim Kerja Poso, Yogyakarta, 29 May 2019 tim FH UGM.

Kegiatan-kegiatan di atas dapat terselenggara karena adanya dukungan beragam pihak di Indonesia dan lainnya dalam membiayai kegiatan-kegiatan di atas dan seluruh tim yang terlibat. Pada akhirnya Tim telah menyelesaikan naskah konsep kebijakan ini dengan harapan rencana yang telah disusun dapat semakin disempurnakan dan dijadikan kebijakan baru di tingkat Poso. Harapan lainnya adalah RAD ini setelah disahkan dapat dilaksanakan. Dengan demikian dukungan dari berbagai pihak baik dalam proses legalisasi, implementasi dan evaluasinya di masa mendatang.

2 Januari 2020

Sri Wiyanti Eddyono
Editor

Daftar Isi

Kata Pengantar	4
I. Pendahuluan	8
II. Kerangka pelibatan perempuan di tingkat global dan nasional	11
III. Inisiatif Kelompok Perempuan dalam penanganan konflik dan paska konflik di Poso	14
A. Periode 1998-2008	14
B. Periode 2008-sekarang	18
IV. Penanganan Konflik dan tantangan yang dihadapi dalam paska konflik di Poso	21
V. Penutup	26
Kesimpulan	26
Rekomendasi	27
USULAN RENCANA AKSI PEREMPUAN UNTUK PERDAMAIAN POSO	30
Daftar Pustaka	36

I. Pendahuluan

Tulisan ini memaparkan apa dan mengapa penting membangun Rencana Aksi untuk Memelihara Perdamaian di Poso yang sensitif gender. Pelibatan perempuan dalam upaya pemeliharaan perdamaian sangat penting untuk memelihara perdamaian berkelanjutan di Poso. Konflik Poso yang telah terjadi di tahun membawa pengaruh yang luar biasa kepada seluruh masyarakat, termasuk perempuan. Kekerasan fisik, kehilangan anggota keluarga, ancaman terhadap kehidupan anggota keluarga lainnya dan bahkan diri masing-masing menyebabkan masyarakat mengungsi meninggalkan rumah untuk dapat mempertahankan hidupnya bersama keluarga. Perempuan-perempuan kehilangan suami dan menjadi kepala keluarga akibat suaminya menjadi korban konflik termasuk musibah yang tidak bisa dihindarkan pada saat konflik di Poso.¹

Temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai kalangan akademis dan lembaga negara mengindikasikan dampak konflik masih sangat berpengaruh pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu di Poso hingga saat ini khususnya terhadap perempuan dan anak. Untuk mengatasi dampak yang berkelanjutan, mereka yang terkena dampak konflik menjadi penting dilibatkan dalam proses pemulihan dan pembangunan paska konflik. Selain itu, mengingat peran perempuan dalam mengatasi konflik sangat menonjol di Poso,² tidak ada alasan mengapa perempuan tidak menjadi bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan paska konflik di Poso.

¹ Lihat Komnas Perempuan, 2014, Kertas Konsep Keamanan Berwajah Perempuan, Komnas perempuan, Jakarta. Lihat pula, Komnas Perempuan, 2019, Perempuan dalam Jeratan Impunitas Pelanggaran dan Penanganan, dapat diakses pada <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-perempuan-dalam-jeratan-impunitas-pelanggaran-penanganan>, diakses pada 20 Agustus 2019

² True, Jacque and Eddyono, Sri Wiyanti, 2017, Preventing Violent Extremism, Gender Perspective and Women's Roles, Research report, Monash University, Australia. hlm. 92.

Kabupaten Poso sebagai salah satu dari 11 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang terletak di sebelah selatan Teluk Tomini dengan jarak sekitar 220 kilometer dari Ibukota Sulawesi Tengah, Palu.³ Kabupaten Poso memiliki topografi wilayah yang beragam, terdiri dari 79 desa di daerah daratan, 37 desa di daerah pegunungan, dan 7 desa di daerah aliran sungai dengan total jumlah desa 133 desa dan 23 kelurahan. Luas Kabupaten Poso sebesar 8.712,25 km² dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2015 terdapat 235.567 jiwa, dengan rincian 113.593 jiwa Perempuan dan 121.974 jiwa laki-laki.⁴ Poso merupakan daerah yang penduduknya memiliki agama yang beragam dengan jumlah penganut agama Islam dan Kristen relatif berimbang dan ditambah penganut agama lainnya. Namun ada wilayah yang mayoritas beragama Islam (Poso pesisir) dan ada pula yang mayoritas beragama Kristen (Tentena).⁵

Kabupaten Poso merupakan wilayah paska konflik sosial keagamaan yang terjadi berulang dalam kurun waktu tahun 1998-2008. Selanjutnya, konflik sosial keagamaan berubah menjadi isu terorisme dan radikalisme oleh kelompok jihadis di Poso dibawah komando Santoso dan pengikutnya.⁶

Saat ini, Poso telah masuk pada situasi damai. Kegiatan ekonomi dan pembangunan dalam masa perdamaian di Poso telah mulai bergerak di tingkat masyarakat seiring dengan situasi keamanan yang perlahan-lahan

³ Lihat <https://www.posokab.go.id/sejarah-kabupaten-poso/>, diakses pada 8 Oktober 2019

⁴ Lihat <https://sulteng.bps.go.id/statictable/2016/04/16/547/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-tahun-2015-.html>, diakses pada 8 Oktober 2019

⁵ Informasi di dapat dari diskusi dengan para stakeholder dalam Workshop Persiapan Penyusunan RAD, Mei 2018.

⁶ *Op. cit.*, True and Eddyono, 2017. Lihat pula, Chernov Hwang, Panggabean and Fauzi, 2013, The disengagement of Indonesia Jihadist in Poso, *Asian Survey* 53:4, p 754-777.

sudah mulai kondusif.⁷ Hal ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik di kalangan pemerintah nasional dan pemerintah daerah. Di tingkat masyarakat Inisiatif muncul dari berbagai kelompok: keagamaan, perempuan, pendidik, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Peran perempuan dirasa sangat menonjol dalam merekonsiliasi masyarakat yang pada saat berkonflik dan paska konflik.⁸

Hanya saja, walaupun konflik telah berakhir di Poso, dampak dari konflik masih terasa baik dalam pembangunan ekonomi, relasi sosial keagamaan dan rasa aman. Masih ada stigma yang kuat bahwa Poso sebagai wilayah yang tidak aman, sebagai wilayah yang rentan konflik dan terorisme. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang relatif lambat pertumbuhannya. Proses produksi barang dan upaya-upaya ekonomi kreatif masih sangat terbatas karena kurangnya peminat/pasar dan investor di Poso, sementara daya beli masyarakat lokal relatif rendah. Dari segi relasi sosial, paska konflik berpengaruh kepada interaksi antar kelompok masyarakat yang masih memunculkan rasa curiga satu dan lainnya, antara kelompok agama yang berbeda, walaupun perlahan pandangan ini teratasi dengan berbagai upaya rekonsiliasi yang berkelanjutan. Bahkan ada kecenderungan anak-anak yang pernah menyaksikan kekerasan di masa konflik masih menyimpan trauma dan bahkan rasa dendam dengan kelompok masyarakat yang dianggapnya telah menyebabkan kehilangan keluarga.⁹ Kondisi ini menjadi pijakan dasar pentingnya upaya untuk menyusun rencana aksi daerah untuk pemeliharaan perdamaian yang lebih partisipatif dan sensitif terhadap perempuan dan anak korban konflik.

⁷ Diskusi stakeholder dalam Workshop Persiapan RAD, Mei 2018.

⁸ *Op. cit.*, True and Eddyono, 2017 a.

⁹ *Ibid.*

II. Kerangka pelibatan perempuan di tingkat global dan nasional

Upaya pelibatan perempuan dalam pemeliharaan perdamaian telah menjadi agenda pemerintah-pemerintah di berbagai negara di tingkat global dan termasuk pemerintah Indonesia. Kebijakan di tingkat internasional antara lain adalah beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan pentingnya peran perempuan dalam perdamaian. **Pertama**, Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 (2000) mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi 1325 (2000) menekankan pendekatan yang meletakkan kontribusi perempuan dan organisasi perempuan sangat penting dalam mencegah, mencari solusi dan mengembangkan perdamaian (disebut sebagai agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan (Women Peace Security/WPS)). **Kedua**, Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 2122 (2013) pun mengintegrasikan upaya penanggulangan terorisme ke dalam agenda Perempuan Perdamaian dan Perdamaian. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2122 (2013) mengidentifikasi bagaimana perempuan dapat memainkan peran yang beragam untuk menghadapi kekerasan bernuansa ekstrimisme dan termasuk mengurangi dukungan untuk kelompok-kelompok tersebut.

Ketiga, upaya pencegahan konflik dan kekerasan berbasis ekstrimisme telah menjadi strategi yang direkomendasikan pula kepada negara-negara anggota, sebagaimana tertera dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB

(UNSCR) 7272 (2014). **Keempat**, PBB juga menyarankan agar setiap negara memiliki *National Action Plan (NAP) on Preventing and Countering Violent Extremism*. Keberadaan NAP dirasa penting untuk menjadi arah dan tujuan pemerintah dalam menghadapi kekerasan bernuansa Ekstrimisme.¹⁰

Kelima, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) telah mengeluarkan rekomendasi No. 30 (2013) tentang bagaimana seharusnya negara-negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menerapkan Konvensi tersebut dalam konteks konflik dan paska konflik. Indonesia sudah meratifikasi CEDAW dalam UU No. 7 Tahun 1984. Salah satu poin penting sebagai negara yang telah terikat pada CEDAW adalah perlu menyusun dan menjalankan kerangka kerja yang komperhensif dalam mengatasi/menghentikan konflik dengan antara lain menyusun mekanisme keadilan transisi, reformasi kebijakan pelibatan perempuan dalam perlindungan perempuan, pencegahan, penghentian kekerasan dan pemulihan korban.¹¹

Keenam, kerangka kerja Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals, SDGS*) telah meletakkan tujuan yang perlu dicapai oleh negara-negara. Dalam SDG 5 tentang keadilan gender dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak salah satunya memastikan perempuan berpartisipasi secara penuh dalam proses seluruh proses pengambilan keputusan dalam bidang politik, ekonomi dan lainnya. SDGs5

¹⁰ Lihat, True, Jacque dan Eddyono, Sri Wiyanti, 2017b, Kertas Posisi, Mencegah Kekerasan bernuansa Ekstrimisme, Perspektif Gender dan Peran Perempuan, Studi kasus di Yogyakarta, Poso, Jakarta dan Cirebon, SCN CREST- Monash GPS, Jakarta.

¹¹ Komnas Perempuan, 2017, Menata Langkah Maju, Kajian Perkembangan Kebijakan.

juga terkait dengan SDGs 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat.¹²

Di tingkat nasional, Indonesia telah mensahkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Inti dari UU ini adalah mengatur tentang upaya-upaya yang harus dilakukan meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan paska konflik. UU ini juga telah menyebutkan penanganan khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan untuk penanganan konflik sosial. Selain itu, pengaturan tindak lanjut adanya pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dalam penanganan konflik juga disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 7 Tahun 2012.

UU Penanganan Konflik Sosial telah mulai dilaksanakan. Beberapa Pemerintah Daerah telah mulai merespon dengan menyusun Rencana Aksi Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau kebijakan lainnya. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat telah menerbitkan Perda No 53 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Kalimantan Barat Tahun 2017-2021. Selain itu Pemerintah Daerah Di Yogyakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017. Pada bulan September 2017, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Aksi Daerah

¹² UNWOMEN, SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls, <http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality>, diakses pada 2 Oktober 2019.

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah.

III. Inisiatif Kelompok Perempuan dalam penanganan konflik dan paska konflik di Poso

Pengalaman perempuan terhadap konflik tidak dapat diabaikan termasuk inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh perempuan secara individu maupun kolektif untuk bertahan dari konflik. Paparan selanjutnya menjelaskan tentang bagaimana respon perempuan baik secara individu maupun secara kolektif dari dua periodisasi di Poso.

A. Periode 1998-2008

Pada umumnya inisiatif perempuan dalam merespon kondisi konflik yang berjalan beragam. Inisiatif terjadi secara spontan. Sebagaimana disampaikan oleh seorang ibu,

...Kami mengungsi mencari tempat yang aman untuk berlindung di asrama kompi 711 kawua Poso dan di sana kami melihat ada yang terluka di paha, ada yang dipotong, yang dihanyutkan di kali dengan tangan dan kaki diikat dan bahkan ada yang... yang saya lakukan membantu mengatasi kesedihan yang terjadi bagi yang luka... untuk diobati dan yang hanyut dilaporkan ke Polres untuk dapat bantuan.¹³

Para perempuan bekerja untuk menangani pengungsi. Beberapa dari mereka berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan nasional, dan

¹³ Disampaikan pada lokakarya Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Damai Perempuan Poso, 29-30 Januari 2019, Poso.

mengajak bertemu tokoh-tokoh dari pihak lain sehingga terjadi deklarasi Malino. Mereka mulai menyebarkan informasi-informasi dan ajakan perdamaian, pengampunan, mengakhiri dan menghapus perang termasuk menghapus dendam. Walaupun dirasa tidak mudah, ajakan-ajakan damai dilakukan melalui khutbah keagamaan, dan pertemuan-pertemuan dengan anggota masyarakat.¹⁴

Inisiatif lain didasarkan pula pada kondisi-kondisi khusus mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan. Misalnya guru-guru yang beragama Islam di salah satu SD melindungi rekan kerja (guru) yang berbeda agama agar tidak diserang oleh kelompok masyarakat yang sedang bertikai.¹⁵

Inisiatif lainnya muncul karena ada kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan kebutuhan pangan. Kondisi ini menyebabkan ibu-ibu memulai berinteraksi dengan berbagai pihak untuk transaksi-transaksi kecil dengan penjual sayur, ikan atau perlengkapan lainnya. Pertemuan di pasar, saling menyapa mereka yang berbeda agama menjadi satu langkah kecil yang berarti untuk memulai relasi selanjutnya. Dalam proses interaksi singkat di pasar telah menimbulkan kesadaran bahwa konflik telah menimbulkan korban di kedua belah pihak masyarakat.¹⁶

Sementara itu inisiatif kolektif perempuan muncul melalui program-program kelembagaan organisasi kemanusiaan dan perempuan yang pada tahun 2000an. Ada berbagai organisasi kemanusiaan yang konsern saat itu bekerja di Poso antara lain adalah LPMS (Lembaga Penguatan Masyarakat

¹⁴ Disampaikan pada lokakarya Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Damai Perempuan Poso, 29-30 Januari 2019, Poso.

¹⁵ Lihat, True, Jacque dan Eddyono, Sri Wiyanti, 2017b, Kertas Posisi, Mencegah Kekerasan bernuansa Ekstrimisme, Perspektif Gender dan Peran Perempuan, Studi kasus di Yogyakarta, Poso, Jakarta dan Cirebon, SCN CREST- Monash GPS, Jakarta.

¹⁶ *Ibid.*

Sipil), KPPPST (Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah). LPMS merupakan organisasi lokal yang memiliki visi memperkuat gerakan sosial dimasyarakat pada wilayah paska konflik LPMS Poso cukup intens menaruh perhatian serius terhadap keberadaan perempuan di semua kelompok agama dan etnis yang ada di kabupaten Poso. Dalam fase ini LPMS aktif memperkuat gerakan kelompok perempuan untuk perdamaian di Poso dilakukan dengan sejumlah intervensi di mulai dari upaya pemulihan psikologi bersama anak-anaknya, pendirian taman baca anak yang sekaligus di isi dengan aktivitas pengajian dan pelayanan kesehatan mental health adalah bagian awal kami untuk membangun kepercayaan untuk keberlanjutan intervensi yang berjalan. Situasi di periode ini merupakan fase rehabilitasi baik aspek social dan ekonomi keluarga. Berkaitan dengan ekonomi keluarga, banyak warga korban konflik Poso yang mulai kembali ke desa-desa asal untuk memulai lagi kehidupan barunya dengan segala kekurangan fisik dan kehancuran sumber-sumber mata pencariannya khususnya mereka yang berstatus petani dan usaha informal seperti pedagang dan usaha kecil lainnya. LPMS melakukan kemitraan dengan berbagai pihak dalam ikut memfasilitasi upaya-upaya rehabilitasi sosial ekonomi warga khususnya bagi kelompok perempuan di bidang pertanian dan usaha jasa lainnya seperti perdagangan kebutuhan rumahan dengan tetap mengintegrasikan perspektif *peace building* menjadi bagian yang harus diikutsertakan.¹⁷

Di fase ini pula KPPPST melakukan pelayanan pendampingan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seksual oleh aparat keamanan di Poso. Saat itu organisasi perempuan yang berbasis hak-hak perempuan sangat

¹⁷ Tulisan refleksi LPSM, Budiman Maliki, 2018.

terbatas. KPKPST mengadvokasi hak-hak perempuan korban kekerasan seksual oleh aparat (polri dan TNI) ditingkat litigasi maupun non litigasi. Salah satu cara memberi penguatan dan menjalankan misi perdamaian KPKPST juga memberi perhatian pada pengorganisasian di tingkat perempuan komunitas muslim dan nasrani. Pengorganisasian dilakukan dengan pola merekrut anggota dan memberikan penguatan pengetahuan hak-hak perempuan, advokasi bersama kasus kekerasan di pengungsian hingga penguatan ekonomi perempuan lintas desa yang bertujuan untuk membangun rasa kepercayaan dan mengikis rasa curiga.

Pada saat paska konflik, KPKPST menemukan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan saat paska konflik yang tidak tertangani dengan maksimal oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah. KPKPST memandang penting adanya kebijakan yang responsif korban, bersama tiga wilayah konflik lainnya Ambon dan Maluku mendorong kebijakan yang dapat mengakomodir hak-hak korban khususnya dari sisi pelayanan, pemulihan dan pemberdayaan.¹⁸ Tahun 2008 Perda No 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Poso diterbitkan oleh pemerintah Poso. Dengan adanya Perda tersebut, Poso merupakan wilayah paska konflik yang paling lebih dulu ketimbang wilayah Ambon dan Maluku.

Untuk menciptakan kemandirian masyarakat khususnya kelompok perempuan KPKPST menginisiasi bersama pemerintah desa dan lembaga adat membentuk posko pengaduan dan informasi di desa dimana posko ini berfungsi melakukan pendampingan litigasi dan non litigasi bagi perempuan

¹⁸ Tulisan refleksi KPKPST, Salma Masri, 2018.

korban di komunitas juga akan memberikan informasi lainnya terkait hak dan akses rujukannya untuk korban tersebut. Posko pengaduan dan informasi terbentuk di 30 desa yang berada di 6 kecamatan di Poso.

B. Periode 2008 - Sekarang

Pada fase ini inisiatif individu semakin menguat menjadi inisiatif kolektif. Hal ini juga karena ada kebutuhan untuk mengatasi rasa takut yang berkepanjangan dengan adanya perubahan konflik, dari konflik antar agama menjadi konflik terkait terorisme. Para perempuan mencoba menghilangkan rasa takut dan saling menguatkan diri. Mereka berdiskusi bersama dan mencoba untuk melihat apa permasalahannya sehingga muncul konflik baru dan mencari jawaban mengapa dan bagaimana mengatasi situasi agar konflik berhenti.¹⁹

Dalam konteks organisasi, selain adanya KPKPST, organisasi perempuan mulai semakin tumbuh dan memberi fokus hampir menyentuh semua isu dan permasalahan di Poso. Organisasi-organisasi ini melakukan advokasi kebijakan pro gender, permasalahan sampai dengan peningkatan kapasitas perempuan di komunitas. Organisasi-organisasi tersebut antara lain adalah Solidaritas Perempuan Palu (SP Palu), Solidaritas Perempuan (SP) Sintuwu Raya, Sekolah Perempuan Perdamaian Poso, Institute Mosintuwu Poso, AMAN dan Buyung Katedo. Selain itu organisasi perempuan keagamaan pun relatif aktif melakukan kegiatan-kegiatan penyadaran atas kebersamaan dan memelihara perdamaian seperti organisasi perempuan di bawah gereja, dan Wanita Islam Alkhairat.

¹⁹ Disampaikan pada lokakarya Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Damai Perempuan Poso, 29-30 Januari 2019, Poso.

Dari sisi kebijakan, KPKPST kembali mengadvokasikan upaya penerapan Perda No 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Poso dalam bentuk adanya Peraturan Bupati sebagai juklak juknis perda tersebut dan mendukung upaya penguatan ditingkat pengurus P2TP2A Kab Poso. KPKPST memberi masukan-masukan kepada P2TP2A melalui rapat koordinasi pengurus untuk menggali kelemahan dan kekuatan serta hambatan dan tantangan ditingkat pengurus, pelatihan kapasitas penanganan korban, pemahaman gender dan HAM sampai dengan audiens bersama bidang hukum pemda guna mendorong adanya peraturan bupati sebagai petunjuk teknis implementasi perda No 6 tahun 2008. Tepat bulan Mei 2011 pemerintah daerah Kabupaten Poso kemudian menetapkan Peraturan Bupati No 11 tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional (SOP) Pelayanan terhadap Korban Kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Poso.²⁰

LPMS selama kurang lebih 5 tahun (2008-2013) memperkuat tingkat kesadaran masyarakat sebagai warga negara dan meningkatkan skill dalam melakukan advokasi kelompok perempuan melalui kampanye anggaran yang pro poor dan gender di bidang-bidang layanan sosial dasar pendidikan, kesehatan dan lainnya, mengkonsolidasikan gerakan perjuangan advokasi perempuan melalui kelompok simpul-simpul di 32 Desa dan mendirikan Pos pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat di desa.

Sekolah Perempuan Perdamaian AMAN Poso dan Institut Mosintuwu merupakan organisasi yang bekerja untuk isu perdamaian dan penguatan

²⁰ Informasi tertulis dari KPKPST, 2018.

ekonomi perempuan komunitas. Sejak tahun 2011 Institut Mosintuwu melakukan penguatan pada perempuan desa untuk mendorong pemberdayaan dan kapasitas perempuan di desa. Media masuknya melalui sekolah perempuan dengan pendekatan ekonomi desa. Mosintuwu memilih perempuan dan anak sebagai pintu masuk karena kelompok tersebut sering kali dipandang sebagai korban yang lemah dan tak berdaya, anak-anak sebagai korban dan objek karena tidak mempunyai ingatan dan perasaan terhadap konflik. Mosintuwu menginisiasi Sekolah perempuan dimana isu yang kembangkan adalah bicara tentang isu perdamaian, kekuatan perempuan dan penguatan gender. Sampai saat ini kurang lebih 500 orang perempuan yang telah bergabung dengan sekolah perempuan di 70 desa. Selain itu, komunitas yang secara spesifik khusus untuk perempuan dan politik ada 250 orang.²¹

Tidak jauh berbeda dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh Institut Mosintuwu, Sekolah Perempuan Perdamaian AMAN Poso juga menjalankan kerja-kerja isu perdamaian melalui perempuan dan penguatan ekonominya di komunitas. Sekolah Perempuan untuk Perdamaian adalah sebuah tawaran Pendidikan Perempuan dengan perspektif yang mementingkan kesetaraan antara Pendidik dan naradidik. Perspektif yang berorientasi pada kesetaraan ini dipercaya sebagai pespektif yang dapat mengakomodir kelompok-kelompok rentan diskriminasi seperti perempuan. Wadah sekolah Perempuan Perdamaian adalah tempat dimana setiap orang dapat berbagi pengalaman dan setiap orang dapat belajar dari pengalaman orang lain tanpa melihat status, golongan, ras dan kelas sosialnya.²² Dalam hal

²¹ Informasi tertulis dari Mosintuwu, 2018.

²² Informasi tertulis dari AMAN Poso, 2018.

melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan desa Sekolah Perempuan Perdamaian dengan memanfaatkan bahan baku hasil bumi dari desa, kerajinan yang memanfaatkan limbah, menanam dan menjual sayur mayur organik yang pada dasarnya semua aktivitas pemberdayaan ekonomi yang dilakukan tersebut tujuannya adalah sebagai wadah berinteraksi satu sama lain yang dapat perdamaian.²³

IV. Penanganan Konflik dan tantangan yang dihadapi dalam paska konflik di Poso

Dalam menangani konflik yang terjadi di Poso, pemerintah di tingkat nasional dan daerah telah mengupayakan berbagai program; intervensi keamanan, rekonsiliasi dan rekonstruksi paska konflik yang dikordinasi langsung oleh pemerintah nasional. Dalam kebijakan keamanan, pemerintah dibawah TNI dan Polri bertugas menangani keamanan secara komperhensif sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Langkah-Langkah Komperhensif Penanganan Masalah Poso.²⁴

Sementara dalam upaya rekonsiliasi, setelah adanya Deklarasi Malino yang berlangsung tanggal 20 Desember 2001, pemerintah melanjutkan upaya mendorong adanya rekonsiliasi melalui pendekatan yang beragam, ke tokoh-tokoh agama dan menyusun program-program pendidikan, membangun universitas, pesantren dan integrasi pendekatan perdamaian di dalam kurikulum sekolah dasar, menengah dan atas.²⁵ Pemerintah juga membangun daerah-daerah atau fasilitas umum yang rusak karena konflik.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Op cit.* Komnas Perempuan, 2014.

²⁵ Lihat True, Jacque and Eddyono, 2017a.

Dari berbagai program yang dilansir pemerintah, intervensi keamanan masih dianggap dilematis. Di satu sisi kebijakan keamanan dipandang perlu dan sangat penting pada masa awal-awal konflik berlangsung. Namun terjadi perpanjangan operasi keamanan dan perpanjangan ini tidak lepas dari pola-pola perubahan aksi model pada ancaman keamanan dan aksi kekerasan di masyarakat pasca konflik berlangsung terutama terkait isu radikalisme dan terorisme. Kebijakan keamanan ini dianggap sudah terlalu lama hadir dan dirasa perlu direview dalam kondisi terbaru.²⁶

Kegiatan operasi keamanan yang relatif lama di Poso oleh Negara ikut berimbas juga terhadap kondisi masyarakat khususnya kelompok perempuan di Poso. Hasil Pemantauan Pelanggaran HAM Perempuan selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005 oleh Komnas Perempuan pada tahun 2007 bersama organisasi lokal di Poso menemukan ada empat bentuk kekerasan seksual (eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, percobaan perkosaan) yang dilakukan oleh aparat keamanan yang di BKO (Bawah Kendali Operasi) di Poso sejak tahun 2001 dimana korbannya adalah perempuan di komunitas.²⁷

Untuk memastikan agar konflik tidak terjadi lagi, pada 2017, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah. RAD ini menjadi penting dan dapat menjadi payung bagi adanya RAD di tingkat kabupaten/kota termasuk kabupaten Poso.

Selain itu, di tingkat pemerintah daerah kabupaten Poso telah dibangun beberapa program terkait:

²⁶ Workshop persiapan RAD dengan stakeholder, Juli 2018.

²⁷ *Op.cit.*, Komnas Perempuan, 2014.

- 1) kebijakan yang berperspektif pro POOR dan pro GENDER. Telah ada Perda No 6 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pelayanan dan Pemulihan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Poso. Kebijakan ini dianggap mengakomodir kepentingan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan.
- 2) Peraturan Bupati No 11 tahun 2011 tentang Prosedur Standar Operasional (SOP) Pelayanan terhadap Korban Kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Poso.
- 3) Kebijakan keterbukaan untuk mengakses (*open to access*) dan partisipasi perempuan dalam berbagai tingkat: perencanaan dan pelaksanaan program.

Namun, kebijakan di atas belum dilaksanakan secara efektif, yang antara lain karena minimnya anggaran untuk melakukan program-program bagi kelompok perempuan di daerah konflik. Penanganan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender termasuk yang dilakukan oleh aparat keamanan yang bertugas di Poso belum menjadi fokus perhatian pemerintah²⁸.

Di samping itu, program paska konflik masih dianggap belum memberikan layanan pemulihan kepada masyarakat yang mengalami trauma akibat konflik. Dalam workshop penyusunan Rencana Aksi Daerah Perempuan untuk Perdamaian di Poso pada Januari 2019 ibu-ibu peserta workshop menyampaikan bahwa mereka masih memiliki trauma dan kecemasan terhadap konflik yang pernah terjadi. Perasaan was-was, dan cemas kehilangan anggota keluarga lainnya, tidak nyaman ketika bertemu dengan orang baru, saling curiga satu dengan yang lainnya masih dirasakan. Ada

²⁸ Disampaikan pada lokakarya Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Damai Perempuan Poso, 29-30 Januari 2019, Poso.

peserta yang merasa masyarakat mereka semakin terkotak-kotak, khususnya antara dua komunitas yang pernah berkonflik (Kristen dan Islam). Mereka menjadi sangat berhati-hati dalam berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda. Bahkan ada kecurigaan terhadap saudara sendiri yang berbeda agama. Selain itu masih ada yang merasakan bahwa dikediaman tempat tinggal masih belum aman dan karenanya merasa tidak nyaman.²⁹

Kebijakan *open to access* yang seluas-luasnya dalam hal tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai tingkat perencanaan dan ruang publik masih hanya sebatas jumlah saja yang diperhatikan, namun hal substantif seperti kualitasnya sama sekali belum dibahas. Program-program yang dihasilkan dan dijalankan oleh SKPD lebih pada perencanaan pendanaan untuk program-program fisik semata dan hanya sedikit dukungan bagi program-program pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi kelompok rentan perempuan, anak dan disabilitas di Poso. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurang dibukanya akses advokasi yang seluas-luasnya bagi kelompok perempuan di akar rumput untuk mengawal aspirasi mereka agar benar-benar terwujud menjadi sebuah kebijakan ril yang bisa didanai dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh mereka. Masih ada stigma tentang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah sebagai pihak yang dianggap bersebrangan dengan pemerintah.

Hal-hal di atas berpotensi dan bahkan sudah berdampak pada pengabaian terhadap peran-peran kelompok perempuan Poso yang secara *de facto* sejak dari situasi konflik pecah dan keadaan situasi paska konflik hingga saat ini telah ikut berkontribusi bagi proses memperkuat gerakan *peace*

²⁹ Disampaikan pada lokakarya Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Damai Perempuan Poso, 29-30 Januari 2019, Poso.

building di wilayah dan kelompoknya masing-masing. Pengalaman-pengalaman lapangan inilah perlu dihargai. Karenanya para pengambil kebijakan baik tingkat daerah, provinsi dan pusat perlu meletakkan kelompok perempuan di Poso menjadi mitra strategis mereka dalam proses pengambilan setiap kebijakan publik. Sekalipun hingga saat ini perhatian pihak-pihak pengambil kebijakan belum seperti yang diharapkan oleh kelompok perempuan tidaklah berarti kelompok perempuan merasa sendirian dalam mengembangkan kapasitas dan kepercayaan dirinya untuk ikut berkontribusi dalam membangun perdamaian sejati di Poso.

Sumber-sumber penghidupan masih belum terolah secara baik. Sebagai contoh, SP Sintuwu Raya mencatat bahwa Kelurahan Tendeadongi dan Petirodongi adalah kantong buruh Migran terbesar di Kabupaten Poso. Pekerja migran di Kelurahan Petirodongi sebagian besar adalah pengungsi dari Kecamatan Lage yang berpindah akibat konflik sosial yang terjadi di Poso pada tahun 2000 silam. Karena kurangnya sumber kehidupan di lokasi pengungsian maka mereka memilih untuk menjadi PBM ke Negara Hongkong dan Singapura. Namun saat sekarang, terdapat PBM yang ditujukan ke Negara Malaysia untuk menjadi Buruh di perkebunan sawit, padahal pra pemberangkatan mereka ditujukan ke Hongkong. Tidak hanya itu, beberapa PBM yang pulang juga dimintai uang ganti rugi serta penahanan dokumen oleh agen yang memberangkatkan mereka, masih lemahnya sistem perlindungan perempuan buruh migran serta pemahaman tentang hak-hak buruh migran, menjadikan perempuan buruh migran dari kabupaten Poso rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan.

Persoalan lain yang berkaitan dengan akses ekonomi melalui sumber daya alam yang dialami perempuan petani di Poso, adalah program penyeragaman bibit menjadikan perempuan petani tidak lagi dapat

memproduksi jagung lokal (jagung pulut) yang jauh lebih sehat dan enak. Saat ini program tersebut masuk melalui program pemerintah di bidang pertanian yang melibatkan TNI yaitu program PAJALE (Padi, Jagung, Kedele). Tahun 2017, Pemerintah Kab. Poso melalui dinas pertanian, membagi-bagikan bantuan bibit jagung hibrida kepada Kelompok Petani termasuk Perempuan Petani. Dalam proses pembagiannya, program ini mengharuskan petani untuk mempunyai lahan hamparan untuk menanam minimal 1 ha, sementara petani dalam luasan tanah 1 ha, sehari-harinya menanam berbagai macam tanaman/sayuran lokal untuk di kebutuhan sehari-hari dan sisanya akan dipasarkan. Dengan kondisi seperti itu, program ini akan mengancam kedaulatan perempuan atas pangannya. Hilangnya sumber-sumber kehidupan, menjadikan sebagian perempuan di Poso mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan menjadi buruh migran ke negara lain. Dalam kurun waktu 2013-2016, terdapat kurang lebih 263 orang buruh migran yang berasal dari Kabupaten Poso. Selain itu, lemahnya akses dan kontrol perempuan dalam sistem pengelolaan sumber daya alam, menjadikan perempuan kehilangan tanah sebagai sumber hidupnya, saat ada perusahaan-perusahaan besar masuk dan bereksplorasi di Poso.

V. Penutup

Kesimpulan

Terjadinya konflik di Poso yang berkelanjutan menjadi pembelajaran yang berharga. Guna merespon konflik, muncul inisiatif individu dan kolektif yang kuat untuk menjaga perdamaian dan membangun kembali Poso khususnya oleh para perempuan. Perempuan-perempuan di komunitas dengan caranya sendiri menyembuhkan luka dan traumatiknya atas kehilangan keluarga,

harta benda dan akses ekonomi. Mereka bangkit dari semua keterpurukan itu bahkan mereka bisa menjadi penyintas dan saling menguatkan sesamanya. Para perempuan di Poso terlibat dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan institusi pendidikan guna melakukan upaya penguatan di komunitas dengan tujuan mencegah konflik berlanjut.

Di tingkat pemerintah nasional, daerah propinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten Poso telah dibangun kebijakan dan program-program pembangunan untuk menjaga perdamaian dan memajukan kehidupan masyarakat di Poso. Di tingkat propinsi Sulawesi Tengah telah disusun Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAD P3AKS). RAD Sulawesi Poso menekankan bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik termasuk dalam membangun early warning system, sistem pencegahan dini dengan mengidentifikasi tanda-tanda awal yang perlu ditangani untuk mencegah konflik.

Di Tingkat Poso program-program penghentian konflik melalui pendekatan keamanan, pendidikan, ekonomi dan kemasyarakatan telah berjalan. Hanya saja perlu ada evaluasi terhadap program yang ada mencerminkan perspektif gender. Selain itu, Rencana Aksi Daerah sudah mulai digagas oleh kelompok masyarakat sipil, akademis dan aktor dari pemerintah. Inisiatif penyusunan RAD perlu dilanjutkan, tidak hanya menjadi kebijakan daerah tapi terimplementasi secara nyata.

Rekomendasi

Pembangunan perdamaian di Poso yang sampai saat ini telah terjaga dengan baik harus di kawal secara terus menerus oleh semua pihak secara sinergi. Gerakan perempuan di Poso perlu tetap mempertahankan posisi yang solid saat ini dan kedepan ini lebih memperkuat gerakan bersama dengan

perluasan isu bagi pengawalan keadilan bagi perempuan dengan mengajak kelompok-kelompok strategis dimasyarakat sebagai mitra atau teman.

Pemerintah perlu menyusun program pembangunan yang pro keadilan gender, termasuk penguatan ekonomi masyarakat di tingkat pedesaan, pemanfaatan akses-akses penghidupan, kesehatan dan pendidikan. Salah satu sarana untuk bersinergi adalah dengan Penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk pemeliharaan perdamaian yang berperspektif Adil Gender.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah untuk pemeliharaan perdamaian perlu segera dilakukan dengan mengacu pada hal-hal di bawah ini:

- a) RAD merupakan bagian dari Kebijakan penguatan partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan manfaat dalam program pemerintah yang dibentuk. Oleh karena itu RAD menekankan keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan Poso.
- b) RAD mencerminkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya perempuan. Inisiatif-inisiatif yang ada di dalam masyarakat, khususnya perempuan, untuk menciptakan perdamaian patut diapresiasi. Inisiatif tersebut khususnya dalam dalam menguatkan kapasitas sesama perempuan di Poso dan menjaga nilai-nilai toleransi kepada sesama perempuan antar komunitas agama dan suku yang berbeda hingga saling mendukung dalam melakukan advokasi bersama atas isu dan permasalahan yang menimpa antar kelompok perempuan Poso.
- c) RAD menekankan pada program pencegahan, penanganan dan evaluasi. Dalam bidang pencegahan, RAD meletakkan program yang

komperhensif yang meliputi; 1) ekonomi dan sumber daya alam; 2) sosial dan budaya; 3) kesejahteraan dan sosial; 4) Pendidikan; dan 5) Bidang politik dan keamanan.

- d) Dalam bidang penanganan RAD meliputi program-program spesifik pemulihan trauma korban dan perempuan paska konflik. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso perlu memberikan perhatian terhadap perempuan korban-korban kekerasan yang terjadi pada masa konflik maupun paska konflik. Program Pemulihan korban dari trauma dan bantuan sosial terhadap korban-korban untuk melanjutkan kehidupannya perlu diperbanyak dan diperluas cakupannya.
 - e) Dalam program evaluasi, akan meletakkan kajian-kajian tentang kebijakan intervensi keamanan yang bersifat operasi keamanan. Di satu sisi kebijakan keamanan masih di rasa penting di sisi lain perlu dirancang kebijakan keamanan yang lebih ramah kepada perempuan dan masyarakat. Perlu ada kode etik dalam pelaksana bidang keamanan supaya operasi keamanan tidak menimbulkan kekerasan dan pelanggaran HAM.
-

USULAN RENCANA AKSI PEREMPUAN UNTUK PERDAMAIAN POSO

Tim RAD Perempuan Poso 2019

ISU PRIORITAS	Program yang Sedang Berjalan (Pemda/OPD/Ormas Keagamaan/Komunitas/Individu)	Identifikasi Tantangan dan Kendala Saat Ini yang Perlu Ditangani Bersama	Langkah-langkah konkret ke depan	Capaian yang diharapkan	Waktu	Penanggung Jawab/Pelaksana
PROGRAM PENCEGAHAN						
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	<p>1. Mendorong Peningkatan Ekonomi melalui rumah produksi makanan khas lokal— Kumdag</p> <p>2. Penguatan Ekonomi, SP Mosintuwu</p> <p>3. Penguatan pengetahuan terkait pengelolaan SDA dan hak atas tanah</p> <p>4. Penguatan Ekonomi perempuan petani tanaman organik Toara, AMAN</p>	<p>1. Kontinuitas ketersediaan bahan baku</p> <p>2. Keterbatasan Modal</p> <p>3. Masih kurangnya data terkait izin perkelapa sawitan oleh PT. SJA2 untuk basis advokasi</p> <p>4. Keterlibatan Perempuan dalam Proses-proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan SDA</p> <p>5. Lahan masyarakat yang diambil oleh perusahaan</p> <p>6. Keterbatasan Bahan Pembuatan Pupuk organik</p> <p>7. Persoalan Pemasaran</p> <p>8. Modifikasi Produk</p>	<p>1. Mendorong Inisiatif Perempuan untuk mengupayakan ketersediaan modal secara mandiri</p> <p>2. Adanya Penyelesaian Konflik lahan di Wilayah Pamona Timur dan Pamona Tenggara Melalui proses-proses dialog dengan Pemerintah maupun DPRD Kab. Poso</p> <p>3. Peningkatan pemahaman perempuan terkait pengelolaan SDA dan hak atas tanah</p>	<p>1. Pemerintah Kab. Poso menyelesaikan konflik agraria yang ada di Pamona Timur dan Pamona Tenggara untuk waktunya 3 tahun</p> <p>2. Peningkatan pengetahuan perempuan lokal terkait akses SDA dan hak atas tanah</p> <p>3. Toara menjadi desa percontohan kebun organik</p>	2020	Wakil Bupati, Kumdag, Kesbangpol, SP Poso, Sekolah Perempuan AMAN)
Bidang Pendidikan	1. Kurikulum pendidikan berkarakter	- Kurikulum belum terintegrasi di	- Mengintegrasikan pendidikan	- Adanya kerja lintas stakeholder	2020	Dinas Pendidikan, Universitas

ISU PRIORITAS	Program yang Sedang Berjalan (Pemda/OPD/Ormas Keagamaan/Komunitas/Individu)	Identifikasi Tantangan dan Kendala Saat Ini yang Perlu Ditangani Bersama	Langkah-langkah konkret ke depan	Capaian yang diharapkan	Waktu	Penanggung Jawab/Pelaksana
	harmoni, sudah ada sekolah harmoni yang berjalan di sekolah percontohan	semua jenjang Pendidikan di Poso - Belum ada regulasi yang dapat dijadikan legitimasi untuk memasukkan pendidikan harmoni di setiap jenjang pendidikan di Poso	harmoni secara luas dan memasukan materi pendidikan harmoni kedalam muatan lokal di setiap jenjang pendidikan di Poso - Mendorong regulasi pendukung (Perbup) pendidikan harmoni alam, sendiri, sesama, dan Tuhan sebagai legitimasi advokasi	untuk mendorong pendidikan harmoni diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan disemua jenjang pendidikan di Poso Adanya regulasi yang bisa dijadikan legitimasi advokasi pendidikan harmoni		Tentena dan SP Poso
	2. Pendidikan perdamaian di jenjang Perguruan Tinggi (PT), sudah ada PT UNKRIT dan STAI yang menerapkan mata kuliah perdamaian dimana semua mahasiswa wajib mengikutinya.	- Belum semua PT melihat pendidikan perdamaian ini penting untuk diterapkan	- Pertemuan pimpinan PT untuk menggagas kurikulum pendidikan perdamaian sebagai MKDU di semua PT			Dinas Pendidikan, UNKRIT dan STAI
	3. Mendorong Kapasitas dan Pengetahuan Perempuan di tingkatan Kampung, terkait Pentingnya Menjaga perdamaian dalam kaitannya dengan Hak Seksualitas Perempuan	- Menguatnya Kelompok-kelompok Fundamentalisme yang mengontrol hak seksualitas Perempuan termasuk cara berpikir perempuan.	- Diskusi di tingkat kampung (wilayah islam dan Kristen)	Menguatnya Pengetahuan Perempuan Poso terkait Pentingnya menjaga sikap prulalisme dan hak seksualitas Perempuan		SP Poso, AMAN, SP Mosintuwu
Bidang Politik	1.Penguatan kapasitas politik perempuan 2.Pendidikan dan pelatihan politik,	1.Kurangnya jumlah perempuan dalam diklat politik	1. Pemetaan untuk perempuan yang telah mendapat diklat politik	1. Data caleg perempuan di legislatif disetiap fraksi dan komisi	2020	SP Poso, AMAN, SP Mosintuw, Dinas Pemberdayaan

ISU PRIORITAS	Program yang Sedang Berjalan (Pemda/OPD/Ormas Keagamaan/Komunitas/Individu)	Identifikasi Tantangan dan Kendala Saat Ini yang Perlu Ditangani Bersama	Langkah-langkah konkrit ke depan	Capaian yang diharapkan	Waktu	Penanggung Jawab/Pelaksana
	untuk perempuan aktif atau yang punya hak pilih	2. Kurangnya kader perempuan dalam menentukan kebijakan PEMDA 3. Tidak ada Parpol yang membuat inisiatif sekolah politik baik bagi kader parpol maupun non kader	2. Pelatihan kepemimpinan perempuan yang berjenjang (target pertahun 1000 perempuan) melalui organisasi perempuan dan organisasi keagamaan	2. Meningkatkan jumlah kader perempuan di level <i>grassroot</i> 3. Keterlibatan perempuan dalam politik harus mencapai 5% per 5 tahun		Perempuan dan Anak
Bidang Kesehatan	Pengurangan kasus AKI (angka kematian ibu)	Belum ada data akurat AKI untuk wilayah Kab Poso	Asesment AKI di Poso	Ada data AKI, kualitas dan infrastruktur layanan kesehatan khususnya bagi perempuan	2020	Dinkes
Bidang Keamanan Kekerasan di level RT, Komunal, dan Negara	1. Perempuan Poso bicara perdamaian 2. Pembinaan FKUB 3. Peningkatan wawasan kebangsaan oleh KESBANG POL 4. Pembinaan napiter (narapidana teroris) oleh LPMS dan Dinsos	1. Perjumpaan Melalui FGD Maupun kegiatan lainnya tidak berlanjut 2. Kepengurusan FKUB Tidak aktif dan minim pengurus perempuan 3. Pelatihan wawasan kebangsaan tidak dilakukan secara rutin terkendala alokasi anggaran pemda 4. Pembinaan napiter butuh keberlanjutan khususnya untuk pemberdayaan 5. Tidak ada mekanisme	1. Menginisiasi dan mengawal kembali perjumpaan perempuan lintas iman melalui organisasi perempuan dan organisasi agama 2. Inventarisasi data kepengurusan FKUB di Poso 3. Secara bertahap dan rutin melakukan pelatihan wawasan kebangsaan 4. Koordinasi data	1. Ada pertemuan berkala perempuan lintas iman dan lintas organisasi keagamaan 2. Ada data Kepengurusan FKUB Poso 3. Ada Pengalokasian anggaran daerah untuk membangun wawasan kebangsaan 4. Ada data dan progres advokasi napiter untuk keberlanjutan pemberdayaannya	2020	Kesbangpol, Dinas Sosial, SP Poso, SP Mosintuw, AMAN, LPMS

ISU PRIORITAS	Program yang Sedang Berjalan (Pemda/OPD/Ormas Keagamaan/Komunitas/Individu)	Identifikasi Tantangan dan Kendala Saat Ini yang Perlu Ditangani Bersama	Langkah-langkah konkrit ke depan	Capaian yang diharapkan	Waktu	Penanggung Jawab/Pelaksana
		pemberdayaan-nya EWS (<i>early warning system</i>) yang dimiliki oleh pemerintah khususnya EWS berbasis komunitas	Napiter dampingan LPMS dan Bentuk advokasi yang Telah dilakukan 5. <i>Asesment system</i> EWS berbasis komunitas berdasarkan kearifan lokal di Poso	5. Ada penggalian data lapangan berdasarkan pengalaman masyarakat		
Bidang sosial, budaya dan keagamaan	1. forum anak dampingan DP3A 2. Sekolah Keberagaman target 75 anak muda 3. Forum Samba'a Raya (Forum Remaja/ Pemuda Lintas Agama) Target 40 orang 4. Kegiatan jumpa berlian (forum perempuan) Target 150 orang Perempuan 5. Membangun kelompok lansia bertutur kebaikan Target 150 orang 6. Poso Ba Baca Target 600 orang Anak 7. Komunitas GUSDURian Target 30 orang/pertemuan/bulan	1. Minat dan kesadaran anak yang masih kurang berkumpul dan berorganisasi 2. Masih ada lembaga keagamaan yang belum merespon 3. Belum ada Alokasi anggaran 4. Masih Kurang Koordinasi Dengan Pimpinan Ormas Keagamaan Dan Ormas Gerakan Perempuan 5. Masih kurang minat baca 6. Belum banyak koleksi buku yang menarik minat anak 7. Belum ada alat transportasi keliling	1. Mangaktifkan Kegiatan-kegiatan Forum anak (SMP dan SMA) Daerah dan Kecamatan 2. Membuat Forum Orang Tua Anak Dampingan Dp3a 3. Sekolah keberagaman di buat di beberapa desa/kelurahan yang pesertanya anak-anak muda lintas agama 4. Kemah Damai 5. Pentas Seni Budaya Di sekolah-Sekolah 6. Aksi bersih Sambal belajar	1. Forum anak paham dan sadar terkait kerukunan dan perdamaian 2. Meningkatkan intensitas pertemuan lintas agama 3. terbangunnya kesadaran anak muda terkait keberagaman 4. Membuka Ruang Perjumpaan Untuk Remaja /Pemuda Lintas Agama 5. Membuka ruang perjumpaan perempuan lintas agama 6. Melestarikan nilai-nilai kebaikan	2020	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, SP Poso, SP Mosintuwu, AMAN, UNKRIT, STAIN, LPMS

ISU PRIORITAS	Program yang Sedang Berjalan (Pemda/OPD/Ormas Keagamaan/Komunitas/Individu)	Identifikasi Tantangan dan Kendala Saat Ini yang Perlu Ditangani Bersama	Langkah-langkah konkrit ke depan	Capaian yang diharapkan	Waktu	Penanggung Jawab/Pelaksana
		untuk fasilitas baca keliling	keberagaman 7. Lansia berbagi cerita Rakyat (kebaikan) 8. Perpustakaan Keliling 9. Diskusi-diskusi tentang pemikiran gusdur	berdasarkan pendekatan budaya 7. Membangun budaya literasi pada anak 8. Membumikan Pikiran-Pikiran Gusdur yang Pluralis		
PROGRAM PENANGANAN						
Penanganan dan pemulihan Korban Kekerasan	1. Penanganan Perempuan Korban Kekerasan paska konflik oleh P2TP2A, kepolisian		1. Perlu pendataan dan evaluasi penanganan terhadap korban khususnya perempuan korban dalam konteks kekerasan yang dilakukan aparat militer 2. Konsep pemulihan korban yang lebih komperhensif 3. Perlunya Pengadaan program trauma-konseling untuk anak-anak korban dan perempuan	1. Tersedianya hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap kondisi perempuan yang mendapat layanan 2. Tersedia dan tersosialisasinya konsep pemulihan korban kepada stakeholder yang menangani korban perempuan dan anak 3. Tersedianya pihak, fasilitas, dana, dan perangkat melakukan trauma konseling bagi perempuan dan anak		Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman
	1. Adanya Forum Kerukunan Umat beragama		1. Penguatan mekanisme kordinasi untuk	1. Tersosialisasinya FKUB dan mekanisme		Kesbangpol

ISU PRIORITAS	Program yang Sedang Berjalan (Pemda/OPD/Ormas Keagamaan/Komunitas/Individu)	Identifikasi Tantangan dan Kendala Saat Ini yang Perlu Ditangani Bersama	Langkah- langkah konkrit ke depan	Capaian yang diharapkan	Waktu	Penanggung Jawab/Pelaksana a
			penangan kasus yang berpotensi menimbulkan konflik	penyelesaian kasus di tingkat masyarakat.		
PROGRAM EVALUASI						
Monitoring dan evaluasi RAD	1. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi setiap tahun.		1. Membangun mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap pelaksanaan RAD	1. Adanya forum enambulan untuk berbagi informasi terhadap apa yang dilakukan. 2. Adanya seminar evaluasi terhadap implementasi RAD		Kesbangpol, seluruh Pihak terkait

Daftar Pustaka

Komnas Perempuan, 2014, *Kertas Konsep Keamanan Berwajah Perempuan*, Komnas perempuan, Jakarta.

True, Jacque and Eddyono, Sri Wiyanti, 2017, *Preventing Violent Extremism, Gender Perspective and Women's Roles*, Research report, Monash University, Australia.

Disampaikan pada lokakarya Konsultasi Penyusunan Rencana Aksi Damai Perempuan Poso, 29-30 Januari 2019, Poso.

Informasi tertulis dari KPKPST, 2018.

Tulisan refleksi LPSM, Budiman Maliki, 2018

Diskusi dengan para stakeholder dalam Workshop Persiapan Penyusunan RAD, Mei 2018.

Diskusi stakeholder dalam Workshop Persiapan RAD, Mei 2018.

Komnas Perempuan, 2017, *Menata Langkah Maju*, Kajian Perkembangan Kebijakan.

SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls, <http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality>, diakses pada 2 Oktober 2019.

—, Sejarah Kabupaten Poso, <https://www.posokab.go.id/sejarah-kabupaten-poso/>, diakses pada 8 Oktober 2019

<https://sulteng.bps.go.id/statictable/2016/04/16/547/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-tahun-2015-.html>, diakses pada 8 Oktober 2019

Komnas Perempuan, 2019, Perempuan dalam Jeratan Impunitas Pelanggaran dan Penanganan, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-perempuan-dalam-jeratan-impunitas-pelanggaran-penanganan>, diakses pada 20 Agustus 2019

